

Pelatihan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan dan Pajak pada Sekayuh Indonesia

¹Lina Said*, ²Yane Devi Anna

*Corresponding Author

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) Ekuitas, Bandung, Indonesia
email: ¹linasaid312@yahoo.com, ²yane.devi@ekuitas.ac.id

Abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) occupy a significant position within the Indonesian economy. The Sekayuh Indonesia MSMEs are engaged in the production and sale of fashion products and bags. The recognition and utilization of these products by individuals, companies, government agencies, and state-owned enterprises is evidenced by the increasing demand and sales of their products. In conjunction with the annual growth in turnover, it is imperative to establish and maintain transparent and accurate financial records. As a partner, Sekayuh Indonesia encounters challenges in its financial management due to the lack of adherence to standards for bookkeeping and financial reporting, particularly with regard to the calculation and reporting of MSME personal taxes. The community service team offers partners assistance in the form of training and guidance on the preparation of financial and tax reports. This is done with the objective of ensuring the future management of the business is conducted in a manner that is both transparent and accountable. As a result, the partner has been able to enhance its financial recordkeeping by implementing a system for tracking monthly income and expenses, thereby facilitating the calculation of profit or loss on a monthly basis. Moreover, it is anticipated that partner will fulfill its tax obligations in accordance with the relevant regulations. The Partner has the potential to expand its business operations, creating employment opportunities and investing in equipment for production. With a focus on product quality and unique advantages, the company has the capacity to achieve further growth and success.

Keywords: Bookkeeping, financial statement, SMEs, tax.

Abstrak

UMKM menempati posisi penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM Sekayuh Indonesia (disingkat "SKYH") bergerak di bidang produksi dan penjualan fashion dan tas, seperti pakaian olahraga, tas ransel, tas pinggang, tas sepeda, tas travel, tas laptop, pouch, dompet, dan souvenir berbentuk tas atau dompet lainnya, kaos, jaket, dll. Pengakuan dan pemanfaat produk-produk ini oleh perorangan, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah, maupun BUMN, dibuktikan dengan meningkatnya permintaan dan penjualan produk mereka. Sehubungan dengan pertumbuhan omset tahunan, sangat penting untuk membuat dan memelihara catatan keuangan yang transparan dan akurat. Mitra SKYH Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangannya yang sesuai pedoman SAK EMKM/ETAP dan penghitungan serta pelaporan pajak orang pribadi UMKM. Pengabdian kepada masyarakat memberikan bantuan kepada Mitra dalam bentuk pelatihan dan bimbingan penyusunan laporan keuangan dan pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan bisnis di masa depan dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Sebagai hasil pengabdian masyarakat ini, mitra telah mampu meningkatkan pencatatan keuangannya dengan menerapkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran bulanan, sehingga memudahkan penghitungan laba atau rugi setiap bulannya. Selain itu, diharapkan pula mitra dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mitra memiliki potensi untuk memperluas operasi bisnisnya, menciptakan kesempatan kerja dan berinvestasi dalam peralatan untuk produksi. Dengan fokus pada kualitas produk dan keunggulan yang unik, perusahaan memiliki kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan lebih lanjut.

Kata kunci: Pembukuan, laporan keuangan, UMKM, pajak.

1. Pendahuluan

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2023, proyeksi UMKM di Jawa Barat mencapai total 7.055.660, dengan pertumbuhan sebesar 5,83% (BAPPENAS, 2024). Meski demikian, UMKM masih menghadapi tantangan dalam pengembangan usaha, terutama terkait penyusunan laporan keuangan. Saat ini, 70 persen UMKM di Indonesia sudah memiliki akses lembaga keuangan, namun kebutuhan pendanaan tambahan di sektor ini masih besar. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan turut menjadi kendala. Selain itu, akses ke sumber pembiayaan juga masih terbatas (Irawati, 2023).

UMKM sering kali memandang laporan keuangan hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat penting untuk mengelola bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran tentang manfaat laporan keuangan dalam mendorong pertumbuhan usaha masih rendah, sehingga banyak UMKM yang hanya menyusun laporan secara sederhana tanpa analisis lanjutan untuk perencanaan atau evaluasi bisnis. Tidak sedikit pelaku UMKM yang tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga sering kali uang yang seharusnya untuk kepentingan usaha digunakan untuk keperluan pribadi. Akibatnya usaha tersebut akan kekurangan modal dan akan sulit berkembang dan bahkan mungkin bangkrut karena tidak dapat membiayai kegiatan operasionalnya (Djoko, 2015). Selain itu, keterbatasan modal menghambat UMKM dalam berinvestasi pada perangkat lunak akuntansi atau pelatihan akuntansi bagi karyawan. Kendala ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan produksi atau pemasaran yang dianggap lebih prioritas (Gunawan, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang untuk memberikan solusi bagi UMKM untuk menyelesaikan masalah dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai standar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih kurang memiliki pemahaman atau bahkan belum mengetahui standar ini. Permasalahan yang sering terjadi pada pengusaha kecil dan menengah adalah pengelolaan keuangan yang masih menjadi kendala. Permasalahan tersebut muncul karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang keuangan (Nurlaela et al., 2023). Pelaku usaha UMKM sebenarnya perlu memahami dasar-dasar akuntansi, tetapi sebagian besar beranggapan bahwa hanya pemilik dan *stakeholders* yang harus memiliki pemahaman tersebut (Cintya et al., 2018). Pada dasarnya, penyusunan laporan keuangan UMKM berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan seperti laporan laba rugi dan posisi keuangan bagi pemilik usaha dan pemangku kepentingan, terutama karena saat ini lembaga pemberi pinjaman seperti bank dan institusi keuangan menuntut laporan keuangan UMKM yang sesuai standar (Dewi, 2019).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Salah satu inisiatifnya adalah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang bertujuan untuk meningkatkan koperasi dan UMKM melalui standar penyajian keuangan serta *good governance* dengan dukungan organisasi profesi. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk membentuk sinergi, dan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta *good governance* koperasi dan UMKM. Standarisasi laporan keuangan ini memudahkan KemenKopUKM dalam membina UMKM karena laporan keuangan mereka telah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku (KemenKopUKM, 2023).

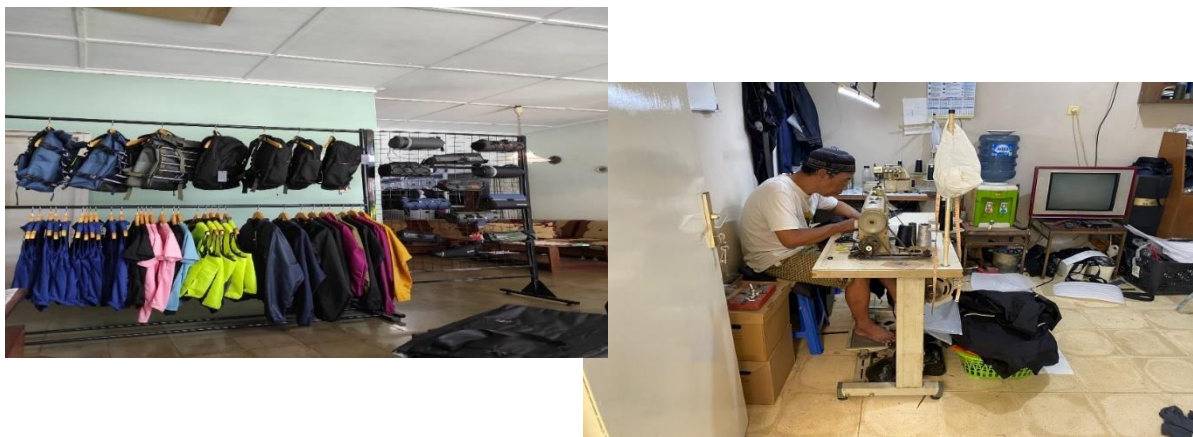
UMKM termasuk dalam kategori Wajib Pajak, baik sebagai Orang Pribadi maupun Badan, sehingga mereka wajib memenuhi kewajiban pajak, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, mereka harus menggunakan SPT Tahunan jenis 1770 dan tidak diperbolehkan menggunakan jenis 1770S atau 1770SS (DJP, 2024). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan para UMKM, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak, rendahnya kesadaran, serta persepsi bahwa proses pajak terlalu rumit (Agriyanto et al., 2022). Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM, potensi untuk memenuhi kewajiban pajak juga akan meningkat (Puspanita et al., 2020). Namun, lemahnya akses informasi

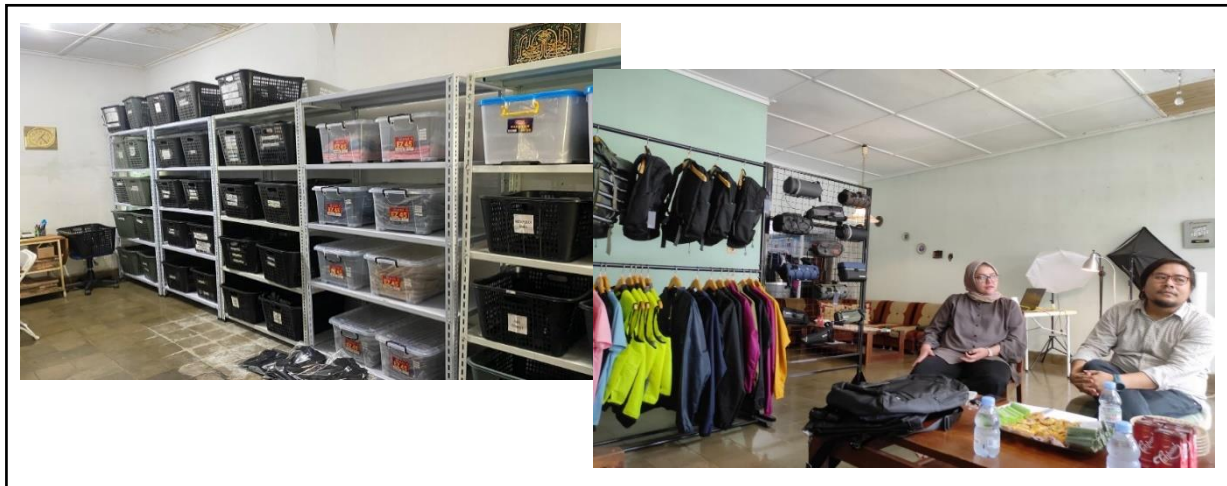
menyebabkan banyak UMKM yang belum memahami manfaat pemenuhan kewajiban pajak, metode pelaksanaannya, serta risiko yang akan dihadapi jika mereka mengabaikan peraturan yang ada. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak untuk mengadakan sosialisasi pajak bagi UMKM, mengingat jumlah UMKM yang sangat banyak di Indonesia (Hidayati, 2021). Adanya peningkatan pemahaman peserta tentang perpajakan setelah mengikuti sosialisasi pajak untuk UMKM, termasuk kemampuan peserta dalam menghitung PPh Final UMKM (Sri Utami et al., 2023).

Salah satu pelaku UMKM di kota Bandung adalah SKYH Indonesia, merupakan UMKM yang memproduksi dan memasarkan produk fashion yang memulai usaha sejak 1 September 2020. Merk “SKYH” sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk klasifikasi produk tas dan pakaian. SKYH Indonesia berlokasi di Dago Bandung, dimana digunakan untuk offline shop dan tempat produksi dengan memiliki karyawan sebagai penjahit dan manajemen dilakukan oleh pasangan suami istri yang merupakan pemilik.

SKYH Indonesia, memasarkan produknya selain *offline shop*, juga melakukan konsinyasi dengan toko yang menjual perlengkapan sepeda serta melalui *online shop* yaitu Shopee dan Tokopedia. Kedua *platform* tersebut yang mendominasi penjualan produk dikarenakan memiliki rating dan review produk dengan kualitas yang baik. SKYH Indonesia menerima pemesanan custom untuk acara atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan, dengan melakukan presentasi langsung mengenalkan produk dengan mitra. Puluhan ribu produk retail dan custom sudah tersebar ke seluruh Indonesia dari Aceh Hingga Papua, baik perorangan, komunitas, perusahaan swasta, BUMN, klinik, brand, kementerian, serta lembaga negara.

SKYH Indonesia berawal dengan memproduksi tas sepeda dengan berbagai model, SKYH termasuk ke dalam 5 top dalam produk tas sepeda di Shopee, lalu berkembang dengan produk lainnya diantaranya tas ransel, tas pinggang, tas travel, tas laptop, pouch, dompet, dan souvenir berbentuk tas atau dompet lainnya. Selain itu, memproduksi dan memasarkan aneka produk pakaian seperti jaket, rompi olahraga, rompi lapangan, kaos, kaos polo, kemeja kerja, dan aneka produk pakaian lainnya baik secara retail maupun *custom*. Selain memproduksi untuk brand sendiri, juga menerima pesanan *custom* mesin obras high speed, serta mesin sablon *heat transfer press* dtf dengan rata-rata penjualan produk per bulannya mencapai 400-500 pcs dengan minimal pemesanan 2 lusin per artikel hingga pesanan dengan jumlah kuantitas yang besar. Produk tersebut dengan menggunakan mesin yang digunakan antara lain mesin potong, mesin jahit dan.

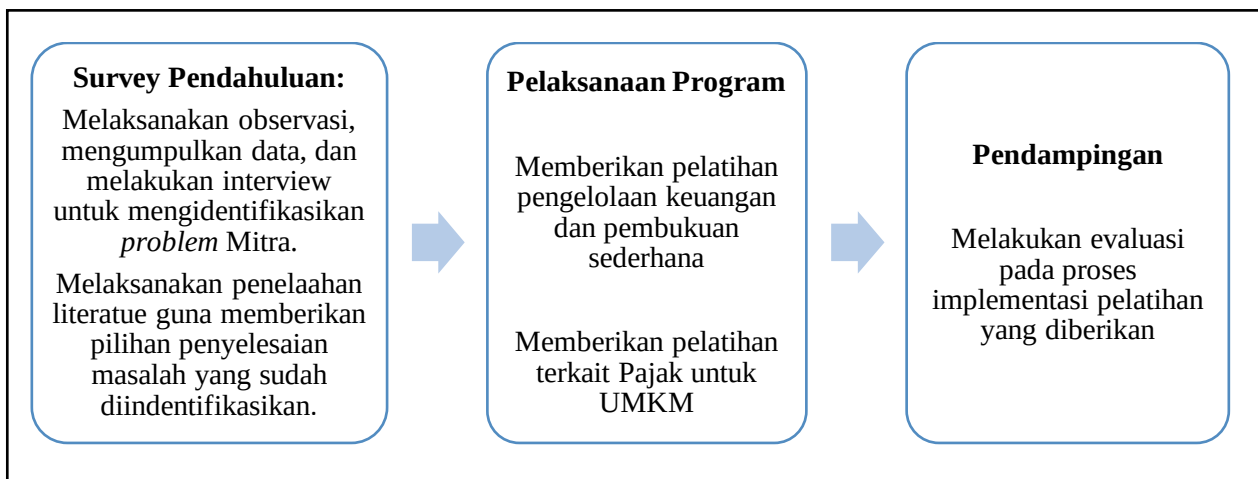




Gambar 1: Produk SKYH Indonesia 500 pcs

2. Metode

Observasi awal dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mitra, kemudian tim pengabdian menganalisisnya guna menemukan jawaban atas masalah yang ditemukan. Metode yang digunakan melalui tahapan *problem solving* yang rasional, yaitu: (1) memeriksa situasi yang ada; (2) merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah; (3) pelaksanaan; dan (4) pelaksanaan dari solusi yang diberikan serta pengendalian pasca-penyelesaian, yang mencakup pemantauan dan penyesuaian bila diperlukan (Winardi, 2015).



Gambar 2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Uraian Tugas Tim Pengabdi

Tabel 1. Hubungan Solusi yang ditawarkan dan Kepakaran

No	Aktivitas yang dilakukan	Dampak yang diharapkan dari solusi	Tim Pengabdi	Kepakaran
1	a. Memberikan pelatihan mengenai	Mitra memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan	Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak., CA (Anggota tim)	Merupakan pengajar pada bidang Akuntansi Keuangan dan pengurus

	pengelolaan keuangan	yang baik dan pembukuan sederhana untuk UMKM	didampingi oleh Kiki Rachmat Rosadi (Mahasiswa)	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jabar.
	b. Membantu memberikan format pembukuan manual secara sederhana			
2	a. Memberikan pelatihan Pajak	Mitra dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, seperti menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA (Ketua Tim)	Merupakan pengajar pada bidang Perpajakan di STIE Ekuitas
	b. Membantu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak UMKM		didampingi oleh Danu Prayogo (Mahasiswa)	
3	Pendampingan	Mitra dapat melakukan pencatatan sederhana dengan baik dan dapat menyusun laporan keuangan serta lebih memahami tentang hak dan kewajiban di bidang pajak	a) Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak., CA (Anggota tim) b) Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA (Ketua tim) c) Kiki Rachmat Rosadi d) Danu Prayogo	

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan PKM ini, pengabdian melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman terkait pengelolaan keuangan
Sebagai usaha yang baru didirikan sekitar empat tahun, maka pengabdian memberikan penjelasan dan diskusi terkait pengelolaan keuangan untuk menyusun program pengembangan usaha. Pengabdian menjelaskan pengelolaan keuangan berdasarkan kendala yang ditemui oleh UMKM berdasarkan hasil penelitian sehingga ini dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan di UMKM. Berikut materi yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan:
 - a) Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha: banyak pemilik UMKM masih belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan bisnis, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pencatatan dan pemantauan arus kas. Untuk dapat mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan, pertama-tama harus dipisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha untuk keteraturan karena pembukuan keuangan yang terpisah akan tercatat dengan jelas dan benar, mana komponen usaha dan mana komponen pribadi (Risnaningsih, 2017) UMKM dapat memulai dengan membuka rekening bank khusus untuk keperluan bisnis dan melakukan pencatatan yang terpisah antara pengeluaran dan pendapatan pribadi serta usaha.
 - b) Penggunaan Sistem Pencatatan yang Konsisten: penggunaan sistem pencatatan keuangan sederhana seperti pembukuan manual atau aplikasi akuntansi digital membantu UMKM dalam memantau keuangan dengan lebih efektif. Meskipun demikian, banyak UMKM yang masih enggan beralih ke teknologi pencatatan karena kurangnya pemahaman atau anggaran yang

terbatas (Pratama, 2020). Dengan pencatatan yang konsisten, UMKM dapat lebih mudah melihat tren pendapatan, pengeluaran, serta merencanakan kebutuhan kas.

- c) **Penyusunan Anggaran dan Perencanaan Keuangan:** UMKM yang memiliki anggaran dan perencanaan keuangan cenderung lebih berhasil dalam mengelola arus kas dan menghadapi ketidakpastian pasar. Penelitian dari (Hidayat, 2021) menemukan bahwa UMKM yang membuat anggaran untuk kegiatan operasional, pengembangan produk, dan investasi memiliki kendali yang lebih baik atas pengeluaran serta mampu meningkatkan efisiensi. Anggaran membantu UMKM dalam mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, mencegah pemborosan, dan membuat keputusan yang lebih strategis.
 - d) **Manajemen Arus Kas yang Baik:** Mengelola arus kas menjadi tantangan bagi banyak UMKM, khususnya dalam industri yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Penelitian menggarisbawahi pentingnya UMKM untuk memantau arus kas secara berkala guna memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk menutupi pengeluaran operasional dan menghadapi kebutuhan mendesak (Putri, 2020). Dalam praktiknya, UMKM perlu mengupayakan saldo kas positif dengan menghindari penundaan pembayaran dari pelanggan, mengelola persediaan dengan efisien, serta menekan biaya yang tidak mendesak.
 - e) **Pemanfaatan Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan:** UMKM yang memanfaatkan laporan keuangan secara teratur memiliki kontrol yang lebih baik atas bisnis mereka. Laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dapat memberikan wawasan penting tentang profitabilitas, aset, dan likuiditas usaha (Kusuma, 2021). Laporan ini juga berguna untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan membantu dalam merencanakan ekspansi usaha dengan lebih baik.
 - f) **Peningkatan Literasi Keuangan:** rendahnya literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang menghambat pengelolaan keuangan yang baik pada UMKM. Program pelatihan literasi keuangan yang ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga swasta telah terbukti membantu pelaku UMKM untuk memahami konsep dasar akuntansi, manajemen kas, dan pengambilan keputusan keuangan (Yanti, 2020). Peningkatan literasi ini sangat penting untuk membantu UMKM beradaptasi dengan tantangan keuangan dan memaksimalkan profitabilitas.
 - g) **Diversifikasi Sumber Pembiayaan:** diversifikasi sumber pembiayaan dapat membantu UMKM dalam menjaga keberlanjutan usaha. Banyak UMKM yang hanya mengandalkan modal pribadi atau pinjaman bank, namun berbagai sumber pembiayaan lain seperti modal ventura, *crowdfunding*, atau pinjaman *peer-to-peer* dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel (Nuraini, 2020). Diversifikasi ini juga membantu UMKM dalam mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik.
- 2) **Melakukan pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana**
- Pengelolaan bukti transaksi. Pengabdian memberikan pelatihan kepada mitra terkait pentingnya menyimpan bukti transaksi, dengan menyusun *filling* yaitu mengumpulkan kwitansi dari bukti transaksi penjualan dan bukti transaksi atas pembelian barang. Pengelolaan bukti transaksi untuk memberikan dasar dalam melakukan pembukuan sederhana, walaupun transaksinya belum begitu banyak, namun ini hal penting sebagai dasar pencatatan keuangan. Bukti transaksi ini difiling berdasarkan tanggal transaksi dan dilakukan pemisahan berdasarkan tipe bukti transaksi seperti *invoice* baik dari transaksi pembelian dan penjualan.
- Pengabdian memberikan penjelasan dan pelatihan mencatat transaksi dan menggolongkan transaksi berdasarkan kegiatan penjualan, pembelian, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan disesuaikan dengan kondisi usaha Mitra. Adapun beberapa masukan yang diberikan oleh pengabdian antara lain:
- (1) Pencatatan sederhana dengan pendekatan akuntansi untuk usaha kecil. SKYH Indonesia sudah melakukan penerimaan dan pengeluaran kas dengan menggunakan excel. Pengabdian memberikan pemahaman dengan mencatat transaksi dengan memastikan pencatatan dengan akun. Dengan memberikan format pencatatan jurnal khusus, sehingga memudahkan dalam mencatat transaksi.
 - (2) Pencatatan Kartu Persediaan. Produk Mitra terdiri dari beberapa produk dan disarankan memiliki menyusun kartu persediaan setiap produk dan menentukan persediaan minimal

dalam setiap produk. Dari hasil wawancara terkadang membuat produk secara mendadak karena ketidaktersediaan produk yang dipesan oleh pelanggan.

- (3) Penyusunan Laporan Keuangan. Pengabdi memberikan pemahaman dan pelatihan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM. Penyajian laporan keuangan ini terutama dalam penyajian laporan laba rugi dengan penyajian SAK-EMKM, untuk penyajian modal dan laporan posisi keuangan sangat sederhana karena mereka penjualan tunai dan tidak memiliki pinjaman kepada pihak eksternal. Penjelasan menyajikan laporan keuangan mulai dari menganalisis bukti transaksi, pencatatan, sampai dihasilkan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan dengan cara yang lebih sederhana namun tetap memenuhi prinsip akuntansi yang benar. Standar ini dirancang agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM yang tidak memerlukan laporan keuangan yang terlalu kompleks. Berikut adalah komponen utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang diberikan paling utama dengan dua laporan keuangan utama untuk memahami SAK EMKM: (1) Laporan Posisi Keuangan atau Neraca mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca untuk UMKM menurut SAK EMKM biasanya meliputi:

1. Aset Lancar: Kas, piutang, dan persediaan yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam waktu satu tahun.
2. Aset Tidak Lancar: Tanah, bangunan, mesin, dan aset lain yang dimiliki untuk jangka panjang.
3. Kewajiban Lancar: Utang yang harus dibayar dalam satu tahun, seperti utang usaha atau utang gaji.
4. Kewajiban Tidak Lancar: Utang jangka panjang, seperti utang bank yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.
5. Ekuitas Pemilik: Modal yang disetor pemilik usaha serta hasil akumulasi laba atau rugi dari kegiatan bisnis.

Laporan Laba Rugi menunjukkan pendapatan dan beban selama satu periode tertentu, dengan format sederhana yang disesuaikan untuk UMKM. Komponen-komponen yang biasa dicantumkan dalam laporan laba rugi meliputi:

1. Pendapatan Usaha: Jumlah total pendapatan dari kegiatan utama usaha.
2. Beban Usaha: Beban yang dikeluarkan selama operasi bisnis, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan beban lainnya.
3. Laba (Rugi) Bersih: Hasil pengurangan antara total pendapatan dengan total beban, yang menunjukkan apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian.

Mitra antusias dalam pelatihan ini karena selama ini belum melakukan pembukuan dan penyajian laporan keuangan. Pelatihan penyajian laporan keuangan ini diharapkan SKYH Indonesia dapat memperoleh modal dari pihak eksternal untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat menambah karyawan maupun peralatan untuk produksi. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dari Mitra adalah keterbatasan modal dan karyawan, hal ini disayangkan karena Mitra memiliki potensi untuk dapat berkembang lebih baik lagi dengan keunggulan produk yang unik dengan kualitas yang baik.

- 3) Memberikan pelatihan pelaporan pajak. Mitra diberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak tahunan. Selama ini Mitra belum melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak, karena merasa omset usahanya masih skala kecil. Sistem yang berlaku di Indonesia mewajibkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, tak terkecuali dalam hal pendaftaran. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sesuai dengan *Self Assessment System*, wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak

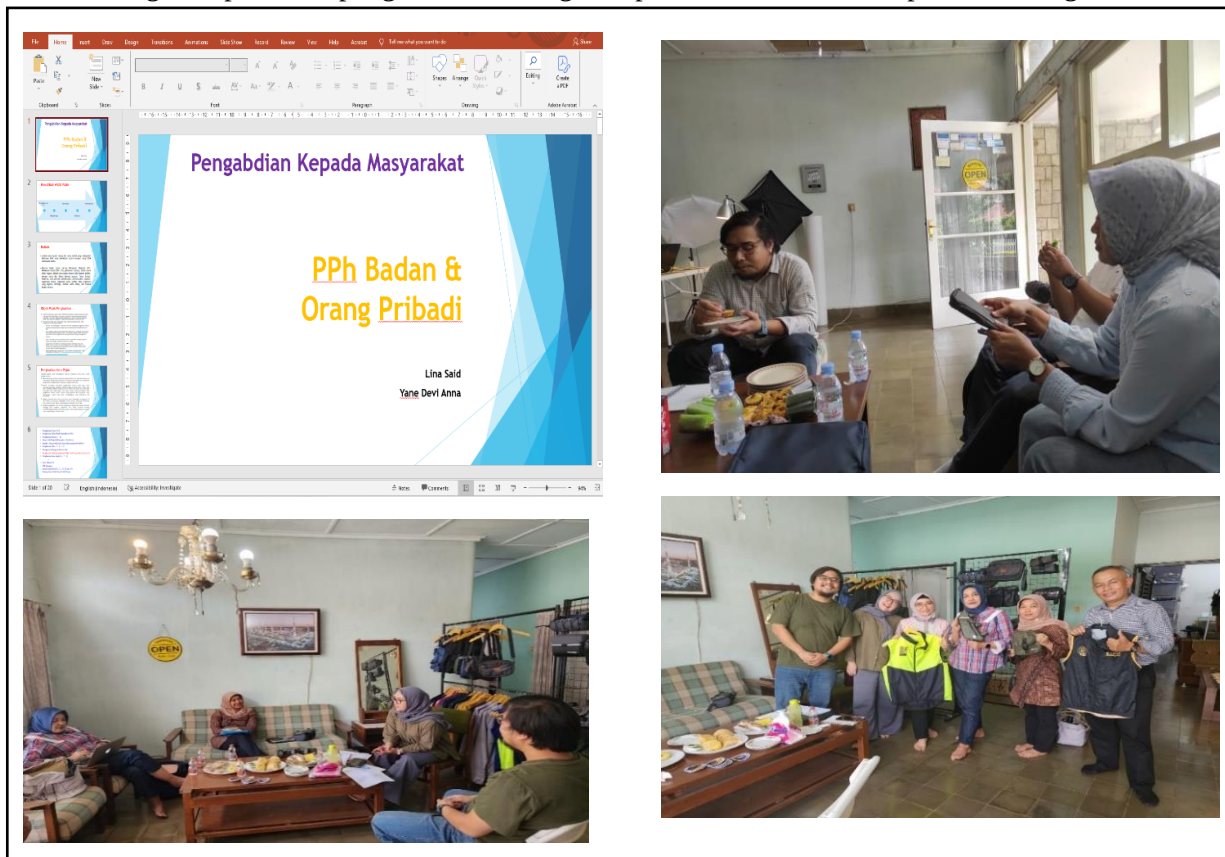
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dengan melengkapi persyaratan. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online melalui DJP online, hingga nanti mendapatkan NPWP secara digital. Mitra pernah mendapatkan tender dari instansi pemerintah, sehingga dipotong pajak penghasilan, namun tidak dapat dikreditkan karena belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, sehingga dapat merugikan Mitra. Pengabdian memberikan pemahaman bahwa apabila Mitra telah menerima/memperoleh penghasilan, hendaknya mendaftarkan diri untuk mendapatkan identitas sebagai Wajib Pajak, dan melaksanakan semua kewajiban di bidang pajak. Setelah melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, Mitra diberikan pemahaman tentang cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Dimulai dari cara menghitung pajak sebagai seorang usahawan, Mitra hendaknya melakukan pencatatan/pembukuan, sehingga nanti dapat dihitung PPh Terutang setahunnya.

Pembukuan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis guna menghimpun data dan informasi keuangan, yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya, serta nilai perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pembukuan wajib dilakukan di wilayah Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan dalam Bahasa Indonesia, serta mengikuti ketentuan lain yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pembukuan harus dilakukan sesuai dengan sistem yang lazim digunakan di Indonesia, seperti Standar Akuntansi Keuangan, kecuali jika peraturan perpajakan menyatakan sebaliknya. Sedangkan pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah wajib pajak orang pribadi berkegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun, atau menurut peraturan perpajakan yang berlaku diperbolehkan untuk melakukan pencatatan. Buku, catatan, dan dokumen, data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia (sesuai dengan batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan).

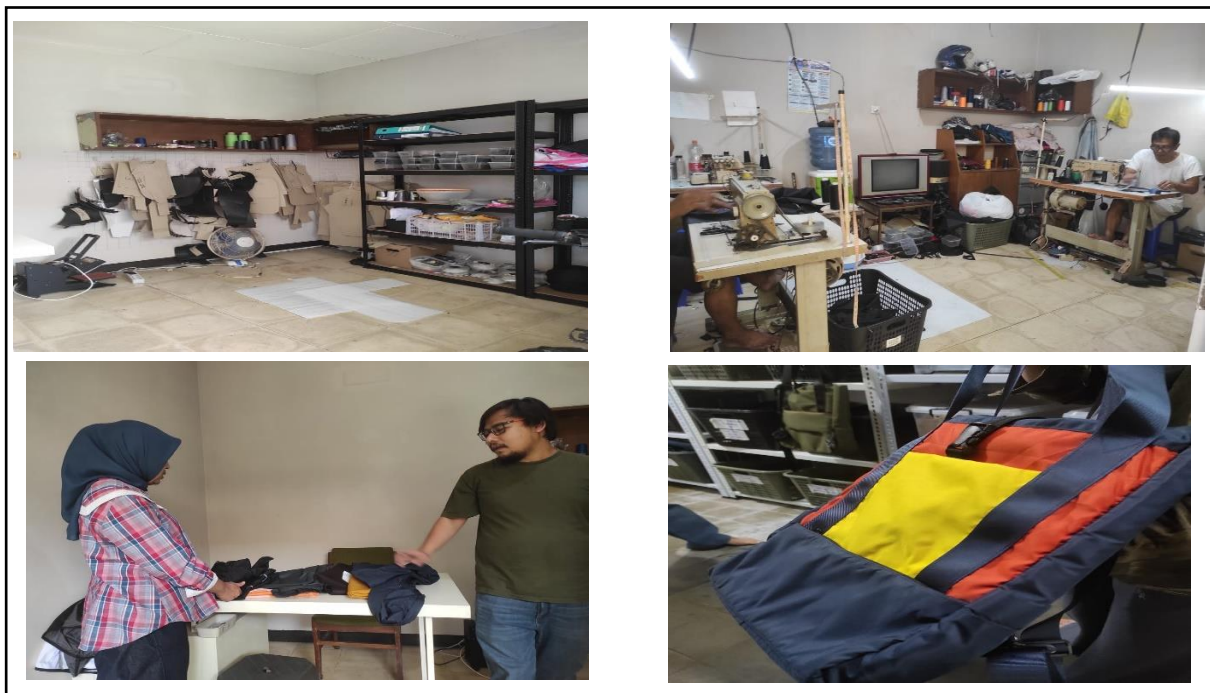
Apabila Mitra telah melakukan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, dapat diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak. Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, dengan mengecualikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak serta penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final. Jumlah penghasilan neto tahunan dapat diperoleh dari hasil pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, dan/atau dari bukti potong pajak (Formulir 1721) yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Langkah kedua, kurangi penghasilan neto tersebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP ditentukan berdasarkan kondisi Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Dari perhitungan ini akan diperoleh jumlah penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang untuk satu tahun.

Langkah selanjutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan yang telah dihitung dengan jumlah kredit pajak. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, baik melalui pemotongan oleh pihak ketiga maupun melalui penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak. Selisih dari pengurangan ini menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Kemudian apabila berdasarkan SPT Tahunan PPh mengalami kurang bayar, maka harus dibayar lunas melalui e-billing sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya. Karena Mitra termasuk kategori Wajib Pajak Orang Pribadi maka pelaporan pajaknya melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770). Pelaporan pajak dapat dilakukan secara online (e-filing) melalui aplikasi DJP Online (DJP, 2024).

Berikut kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan kepada SKYH Indonesia pada bulan Agustus 2024.



Gambar 3 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 4. Proses Produksi, Bahan Baku, dan Sample Produk SKYH Indonesia

Hasil pengabdian dan wawancara dengan Mitra menunjukkan bahwa Mitra dapat lebih memahami dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan sederhana. Sebelumnya Mitra hanya menghitung setiap melakukan produksi atau pemesanan, sehingga tidak dapat melihat laba perusahaan

dengan detail per periode. Setelah dilakukan pelatihan dan bimbingan, Mitra melakukan pencatatan bulanan untuk pemasukan dan pengeluaran, sehingga mampu menghitung laba atau rugi setiap bulan. Pengelolaan keuangan Mitra menjadi lebih baik juga terkait perhitungan harga produksi. Setelah pelatihan dan bimbingan mengenai perpajakan, Mitra dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku seperti dalam hal pelaporan pajak melalui SPT Tahunan. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuangan dan pajak ini memberikan peluang SKYH Indonesia memperoleh pinjaman pada Lembaga keuangan karena selama ini SKHY hanya mengandalkan dana yang dimiliki dari hasil operasional usaha. Dengan adanya tambahan dana, memungkinkan dilakukan penambahan karyawan dan peralatan produksi, sehingga SKYH Indonesia dapat memperluas usahanya.

4. Simpulan

SKYH Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perlengkapan sepeda memproduksi dan memasarkan aneka produk tas, pakaian seperti jaket, rompi olahraga, rompi lapangan, kaos, kaos polo, kemeja kerja, dan aneka produk pakaian lainnya baik secara retail maupun custom. Dengan keterbatasan sarana dan pengetahuan literasi keuangan, Mitra diberikan pemahaman mengenai pembukuan sederhana serta pemahaman tentang pajak.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, Mitra dapat lebih memahami dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan sederhana. Hal tersebut dapat dilihat sebelumnya Mitra hanya menghitung setiap melakukan produksi atau pemesanan, sehingga tidak dapat melihat laba perusahaan dengan detail per periode. Setelah dilakukan pelatihan dan bimbingan Mitra melakukan pencatatan bulanan untuk pemasukan dan pengeluaran, sehingga mampu menghitung laba atau rugi setiap bulan. Pengelolaan keuangan Mitra menjadi lebih baik juga terkait perhitungan harga produksi. Setelah pelatihan dan bimbingan mengenai perpajakan, Mitra memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melaporkan pajaknya melalui SPT, sebelumnya Mitra belum memahami ketentuan perpajakan. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuangan dan pajak memberikan peluang SKYH Indonesia dapat memperluas usahanya, dengan memperoleh pinjaman pada Lembaga keuangan karena selama ini SKHY hanya mengandalkan dana yang dimiliki dari hasil operasional usaha. Jika dengan adanya tambahan dana maka memungkinkan dilakukan penambahan karyawan dan peralatan produksi. Mitra juga memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dengan keunggulan produk yang unik dan berkualitas tinggi.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas yang telah memberikan pendanaan sehingga terlaksana program pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan lancar.

6. Referensi

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- BAPPENAS. (2024). *Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah*. 28 Juni. <https://katalog.data.go.id/dataset/proyeksi-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kategori-usaha-di-jawa-barat>
- Cintya, A., Suparti, D., & Restuningdiah, N. (2018). THE ANALYSIS OF ACCOUNTING SYSTEM FORMULATION BASED ON SAK EMKM. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16, 229–234.
- Dewi, L. G. K. . & S. L. G. J. (2019). Luh Gede Kusuma Dewi_Jurnal Ilmiah Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4 (2), 141–160.
- Djoko, S. G. (2015). Peranan Laporan Keuangan Dalam Rangka Memberdayakan Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6 (1).
- DJP. (2024). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. <https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0>

- Gunawan, S. . et al. (2020). Analisis Kendala Penggunaan Sistem Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Manajemen*.
- Hidayat, M. . et al. (2021). Peran Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Hidayati, M. . K. R. . A. W. . R. & A. (2021). Mainita Hidayati_JMM. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5 (2), 746–756.
- Irawati. (2023). Sebanyak 57% Debitur PIP Pilih Pembiayaan Syariah, Ini Alasannya. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/sebanyak-57-debitur-pip-pilih-pembiayaan-syariah-ini-alasannya/>
- KemenKopUKM. (2023, December). *KemenKopUKM Gandeng IAI Perkuat Standardisasi Pelaporan Keuangan Dan Tata Kelola KUMKM*. <https://umkm.go.id/read/kemenkopukm-gandeng-iai-perkuat-standardisasi-pelaporan-keuangan-dan-tata-kelola-kumkm>
- Kusuma, D. . & R. A. (2021). Pemanfaatan Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Nuraini, S. . & S. E. (2020). Diversifikasi Sumber Pembiayaan untuk Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Pembiayaan Dan Bisnis*.
- Nurlaela, N., Budiandriani, B., & Suriyanti, S. (2023). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Dipengaruhi Oleh Literasi Keuangan. *Jesya*, 6(2), 1825–1834. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1197>
- Pratama, A. . & N. D. (2020). Pengaruh Sistem Pencatatan Terhadap Efektivitas Manajemen Keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., Pratiwi, R., Iii,) D, Ekonomi, F., Bisnis, D., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK UMKM GUNA MENDORONG MASYARAKAT SADAR PAJAK DI KOTA CILEGON. *Communnity Development Journal*, 1(3), 375–382.
- Putri, A. . & S. H. (2020). Manajemen Arus Kas dan Kesuksesan Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Risnaningsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97>
- Sri Utami, E., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2023). *Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta MSMEs Tax Socialization And Financial Records Training To MSMEs Trader On Wates Street Yogyakarta* (Vol. 7, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Winardi. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi* (Edisi Revisi). Prenada Media Group.
- Yanti, R. . & P. I. (2020). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi UMKM. *Jurnal Edukasi Keuangan*.